
Pengaruh Ki Sarmidi Mangoensarkoro Dalam Lahirnya UU Pendidikan Nasional Pertama Dan Perkembangan Pendidikan Di Indonesia

Nurul Nabila Putri¹

¹*Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang*

**Correspondence Author: nuruuulnabila@students.unnes.ac.id.*

Abstract: Ki Sarmidi Mangoensarkoro adalah tokoh penting di bidang pendidikan pada masa Pergerakan Nasional. Beliau merupakan salah satu tokoh yang dipercaya Ki Hajar Dewantara untuk menyusun rancangan pelajaran baru yang akan diterapkan di perguruan Taman Siswa. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mendeskripsikan peranan Ki Sarmidi Mangoensarkoro di bidang pendidikan, (2) mendeskripsikan pengaruh Ki Sarmidi Mangoensarkoro terhadap lahirnya UU Pendidikan Nasional pertama di Indonesia, (3) mendeskripsikan perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa pergerakan hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) peran penting Ki Sarmidi Mangunsarkoro terhadap pendidikan di Indonesia, (2), pendidikan di Indonesia berangsur-angsur membaik setelah disahkannya UU Pendidikan, (3) perkembangan pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat.

Kata kunci: Ki Sarmidi Mangunsarkoro; pendidikan; UU Pendidikan Nasional

Abstrak: Ki Sarmidi Mangoensarkoro was an important figure in the field of education during the National Movement. He is one of the figures trusted by Ki Hajar Dewantara to draft new lessons to be implemented at the Taman Siswa college. This research aims to; (1) describe the role of Ki Sarmidi Mangoensarkoro in the field of education, (2) describe the influence of Ki Sarmidi Mangoensarkoro on the birth of the first National Education Law in Indonesia, (3) describe the development of education in Indonesia from the movement period until now. This study uses a qualitative method. The results of this study are (1) Ki Sarmidi Mangunsarkoro's important role in education in Indonesia, (2), education in Indonesia has gradually improved after the passing of the Education Law, (3) the development of education in Indonesia has progressed rapidly.

Keywords: Ki Sarmidi Mangunsarkoro, education, National Education Law

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang penting dan perlu diajarkan sejak dini. Dengan menempuh pendidikan, seseorang dapat menaikkan status sosialnya. Banyak manfaat yang bisa didapat dengan pendidikan, seperti mengasah kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan perekonomian, dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang membutuhkan. Namun, sayangnya pola pikir masyarakat sekarang sudah mulai berubah, banyak yang beranggapan bahwa pendidikan hanya sarana untuk mencari pekerjaan. Dadang (2015) mengatakan sebagai berikut: "Masyarakat, yang dalam

tingkatan tertentu masih sebagai obyek pendidikan (baik karena aktif maupun pasif) telah begitu meyakini bahwa pendidikan adalah tangga dalam karir, karena itu ukuran baik atau tidak suatu pendidikan di mata masyarakat adalah sejauh mana anak-anak mereka dapat bekerja selepas lulus."

Beberapa orang tua memiliki pemikiria bahwa sekolah hanya membuang-buang waktu dan uang, serta ada yang menganggap sekolah sebagai beban karena masalah perekonomian. Padahal tujuan dari pendidikan tidak hanya untuk sekadar mencari pekerjaan melainkan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar menambah wawasan dan memudahkan dalam mencari solusi dari permasalahan-

permasalahan yang ada, serta membentuk karakter yang bermatabat daripada hanya mencari pekerjaan. Banyak anak di luar sana yang terpaksa harus mengubur cita-citanya karena tidak memiliki biaya padahal mereka memiliki keinginan yang tinggi untuk terus menempuh pendidikan. Namun, ada juga orang tua yang rela melakukan apa saja untuk bisa menyekolahkan anaknya agar dapat mewujudkan cita-cita mereka.

Di zaman sekarang ini, sangat banyak media yang bisa digunakan untuk belajar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet. Dengan adanya internet seseorang bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Tidak seperti saat masa kolonial Belanda dimana kaum pribumi sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan. Pada masa itu pemerintah kolonial Belanda membuat program politik etis untuk balas budi dan sebagai permintaan maaf atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Program politik etis ini berupa irigasi, imigrasi, dan edukasi. Pemerintah Belanda membuat sekolah yang bertujuan untuk menciptakan bangsa yang berkualitas. Namun, hanya beberapa kaum pribumi yang dapat memperoleh pendidikan yang layak. Lagipula pendidikan kolonial tidak berorientasi untuk memajukan rakyat Indonesia melainkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas agar dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah.

Selain itu, terdapat diskriminasi status sosial yang dialami oleh rakyat pribumi. Awalnya pendidikan dapat diakses oleh semua golongan masyarakat. Mereka dapat dengan mudah mengakses pendidikan dengan belajar cara membaca, menulis, dan menghitung. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat golongan bawah karena mereka tidak perlu bersusah payah untuk memperoleh pengetahuan. Namun, lambat laun akses untuk mendapatkan itu semua semakin sempit dan didominasi oleh golongan atas saja. Tidak hanya diskriminasi status sosial saja, terdapat diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh Belanda. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya akses untuk mendapat pekerjaan dari lulusan sekolah Belanda daripada lulusan pesantren.

Namun, dengan adanya pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Belanda ini lahir golongan terpelajar. Situasi ini dimanfaatkan oleh para golongan terpelajar untuk memberontak dengan cara mendirikan berbagai macam organisasi pergerakan nasional yang akan meningkatkan kesadaran kaum pribumi agar tidak terikat terus menerus dari para penjajah. Taman Siswa adalah salah satu dari banyaknya organisasi yang didirikan pada masa pergerakan nasional. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Organisasi ini dibuat sebagai bentuk pemberontakan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah colonial Belanda. Tujuannya adalah untuk menyetarakan semua golongan terutama golongan bawah untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama seperti golongan atas. Taman siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi rakyat Indonesia serta mengajarkan pada siswanya bahwa harus teguh terhadap prinsipnya dan harus bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan orang lain.

Sering berjalannya waktu, Taman siswa mengalami perkembangan hingga ke luar daerah Yogyakarta dan banyak daerah-daerah yang mendirikan cabang Taman Siswa. Tentu saja dalam kesuksesan Taman Siswa ini Ki Hajar Dewantara tidak bergerak sendiri. Terdapat beberapa orang yang berperan penting dalam kemajuan perguruan Taman Siswa. Salah satu tokoh itu adalah Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Beliau merupakan orang yang dipercayai oleh Ki Hajar Dewantara untuk memimpin dan mendirikan cabang perguruan Taman Siswa di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1929.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro merupakan tokoh pendidikan nasional di Indonesia. Dalam kemajuan perguruan Taman Siswa, Ki Sarmidi dipercayakan untuk merumuskan rencana pelajaran baru yang akan diterapkan di Taman Siswa. Rencana pembelajaran ini berisi tentang nilai-nilai nasionalisme, yaitu dengan menerapkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar pembelajaran dan bahasa

keseharian. Beliau juga diangkat sebagai pemimpin Umum Taman Siswa Jawa barat hingga tahun 1940 dan menjadi menjadi salah satu menteri yang membuat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menulis artikel berjudul "Pengaruh Ki Sarmidi Mangoensarkoro dalam Lahirnya UU Pendidikan Nasional Pertama dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia"

METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini metode yang megutamakan analisa dan kajian deskriptis. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Penelitian kualitatif digunakan untuk mendefinisikan secara naratif pada suatu kegiatan yang dilakukan dan dampaknya dari tindakan yang telah dilakukan terhadap kehidupan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Ki Sarmidi Mangoensarkoro di Bidang Pendidikan

Ki Sarmidi Mangoensarkoro lahir dari keluarga yang dihormati dan merupakan golongan priayi. Maka dari itu, beliau memiliki riwayat pendidikan dan pengalaman organisasi yang baik da cukup banyak. Ki Sarmidi Mangunsarkoro selesai menempuh Sekolah Angka Loro setelah 5 tahun. Di sana beliau belajar membaca, menulis bahasa Jawa, berhitung, olahraga, dan bernyanyi serta mendongeng. Setelah lulus dari Sekolah Angka Loro beliau melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta, yaitu di sekolah *Technische Princess Juliana School*. Sekolah ini merupakan sekolah teknik ketiga di Indonesia yang nantinya akan melatih siswanya menjadi tenaga ahli

kontruksi. Sekolah ini juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Setelah lulus dari sekolah *Technische Princess Juliana School*, Ki Sarmidi memutuskan meninggalkan Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru Arjuna yang berada di Jakarta. Lalu setelah itu Ki Sarmidi Mangunsarkoro semakin mendalami pendidikannya dengan mengambil ilmu sosiologi di Fakultas Hukum Jakarta.

Tidak hanya itu, Ki Sarmidi Mangoensarkoro juga bergabung dan menjadi anggota aktif di organisasi Tri Koro Darmo. Tri Koro Darmo adalah organisasi pemuda terpelajr di Indonesia pertama yang diketuai oleh Satiman Wirjosandjojo. Tujuan dari didirikannya organisasi ini adalah untuk menanamkan rasa cinta tanah air, melatih seseorang menjadi calon pemimpin nasiona di Indonesia, dan memperkuat tali persaudaraan antar suku bangsa yang ada di Indonesia.

Pada Juni 1918 Tri Koro darmo berubah nama menjadi Jong Java. Ki Sarmidi Mangunsarkoro merupakan salah satu tokoh yang berperan penting di Jong Java. Beliau memimpin majalah yang diterbitkan oleh Jong Java yaitu Soeara Afdeling Djogja dan diangkat menjadi ketua Jong Java lalu selanjutnya menjadi ketua Jong Theosofien Yogyakarta. Ki Sarmidi Mangunsarkoro merupakan salah seorang yang menganjurkan gagasan tentang kesatuan Indonesia (Rh. Widada, 2013).

Setelah lulus dari Sekolah Guru Arjuna, beliau kembali ke Yogyakarta untuk mengabdikan menjadi guru di Taman Muda di Yogyakarta yang merupakan cabang dari Taman Siswa. Gelar "Ki" didapatkan ketika beliau mengajar di sana selama tiga tahun. Setelah itu, Ki Sarmidi Mangunsarkoro kembali ke Jakarta dan kemudian dipercayai untuk menjadi kepala sekolah HIS Budi Utomo dan HIS Marsidi Rukun. Dikarenakan menjabat sebagai kepala sekolah, akhirnya Ki Sarmidi menggabungkan HIS Budi Utomo dan HIS Marsudi Rukun (Tarigan, 2013).

Metode belajar yang diterapkan Taman Siswa adalah Metode sistem among. Sistem among ini belandaskan pada kekeluargaan dan menerapkan prinsip

keteladanan Ing Ngarsa Tuladha yang berarti seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Anak akan melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya, bila guru memberikan teladan yang baik maka anak akan baik pula perilakunya. Dalam hal ini, guru harus selalu memberikan pengarahan dan mau menjelaskan supaya siswa menjadi paham dengan apa yang dimaksudkan oleh guru (kominfo, 2016).

Ki Sarmidi Mangunsarkoro merupakan salah satu pendiri Taman Siswa di Jakarta. Taman Siswa ini didirikan atas permintaan rakyat kemayoran dan disetujui oleh Ki Hajar Dewantara. Perguruan Taman Siswa ini didirikan pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dengan pembukaan Taman Siswa ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. Mereka yang tadinya belum bisa menyekolahkan anak-anaknya karena terhalang status sosial akhirnya bisa sekolah di perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa pun dengan senang hati menerima siapapun yang memiliki semangat belajar yang tinggi karena Taman Siswa sendiri memiliki paham bahwa pendidikan merupakan hal penting dan menjadi sarana untuk memerdekakan manusia agar bisa berdiri dengan kakinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Pemerintah Belanda menganggap perkembangan Taman Siswa sebagai sesuatu yang berbahaya karena Pemerintah Belanda mungkin berpikir bahwa rakyat Indonesia akan berbalik menyerangnya. Maka dari itu, Pemerintah Belanda mengeluarkan Organisasi Sekolah Liar pada 1 Oktober 1932 yang berisi peraturan bahwa sekolah pendirian sekolah dan guru yang mengajar harus meminta izin kepada Pemerintah Belanda terlebih dahulu. Taman Siswa termasuk salah satu sekolah liar dan belum mendapat izin dari Pemerintah Belanda, namun sekolah itu tetap berdiri karena kegigihan rakyat Indonesia dan dukungan besar dari orangtua siswa, akhirnya peraturan itu dicabut (Rh. Widada, 2013).

Ki Sarmidi Mangunsarkoro juga merupakan salah satu orang kepercayaan Ki

Hajar Dewantara sehingga ditugaskan untuk merancang rencana pelajaran baru yang akan diterapkan di perguruan Taman Siswa. Nilai-nilai yang dimuat dalam rencana pelajaran baru adalah nilai Nasionalisme, yaitu dengan menerapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Aspek kebudayaan juga ditekankan pada generasi muda dalam rencana pelajaran tersebut. Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Taman Siswa hanya dalam satu tahun dan beliau juga mampu menyelesaikan rencana pelajaran baru yaitu kurikulum Taman Siswa yang kemudian di sahkan dengan nama "Daftar Pelajaran Mangunsarkoro" pada tahun 1932. Ki Sarmidi Mangunsarkoro juga menulis berbagai macam judul buku mengenai pendidikan nasional, kebudayaan, dan politik. Salah satu buku yang terkenal adalah "Pengantar Guru Nasional". Buku ini mengandung aspek kebangkitan nasionalisme dan sudah tercetak ulang pada tahun 1935.

Perguruan Taman Siswa yang didirikan Ki Sarmidi Cabang Jakarta mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya Taman Siswa ini hanya digunakan untuk Taman Anak dan Kursus Guru, lalu bertambah dengan adanya Taman Muda yang digunakan untuk siswa SD kelas IV sampai IV. Selain itu juga terdapat Taman Dewasa yang diperuntukkan pada jenjang SMA. Karena banyaknya kelas-kelas baru, maka perguruan ini mengupayakan perluasan dan menambah gedung sekolah baru. Taman Dewasa Raya setingkat SMA dibuka pada tahun 1933 yang ditujukan untuk jenjang yang lebih lanjut. (Rh. Widada, 2013).

Taman siswa seiring bejalannya waktu, perguruan Taman Siswa di Jakarta mulai berkembang. Murid-murid yang bersekolah di sana terus menerus bertambah karena Ki Sarmidi Mangunsarkoro pintar mendekati masyarakat dan disukai murid dari semua angkatan. Penyusun daftar pelajaran di Taman Muda antara lain Soewandhie dan Ki Sarmidi Mangunsarkoro.

Pada 17-23 Desember 1933 rencana daftar pelajaran mengalami perubahan. Setelah adanya rapat besar tahun 1933, rencana daftar pelajaran Taman Dewasa diserahkan pada Perguruan Taman Siswa Jakarta (Reza dan Dyah, 2018).

2. Pengaruh Ki Sarmidi Mangoensarkoro terhadap lahirnya UU Pendidikan Nasional pertama di Indonesia dan Kebijakan Pendidikan

Ki Sarmidi Mangunsarkoro adalah tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pengaruh penting dalam lahirnya UU Pendidikan Nasional pertama di Indonesia pada tahun 1945. Bisa dilihat dari latar belakang beliau yang pernah menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah di Jawa Tengah dan juga menjadi orang kepercayaan Ki Hajar Dewantara dengan membuat rencana pelajaran baru yaitu kurikulum Taman Siswa. Beliau merupakan salah satu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang ditugaskan untuk merumuskan undang-undang pendidikan nasional Indonesia.

Tujuan utama Ki Sarmidi Mangunsarkoro dan timnya dalam membuat Undang-Undang Nasional pertama adalah untuk menciptakan pendidikan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial. Ki Sarmidi dan rekannya ingin mengubah sistem pendidikan di Indonesia karena pada masa itu pendidikan masih memandang latar belakang, status sosial dan agama. Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 20 Mei 1947 ini memberikan dasar bagi sistem pendidikan nasional di Indonesia, termasuk pendidikan dasar dan menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan keagamaan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional ini menjadikan dasar sistem pendidikan di Indonesia yang masih berlaku hingga sekarang, meskipun telah mengalami beberapa kali revisi. Dalam hal ini, Ki Sarmidi memiliki pengaruh penting dalam sistem pendidikan Indonesia.

Ki Sarmidi berperan penting pada aspek pendidikan ditandai dengan diangkatnya beliau menjadi Menteri Pendidikan. Beliau menjabat sebagai Menteri

Pendidikan selama satu tahun (1949-1950). Sebagai Menteri pendidikan, Ki Sarmidi mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu Pemberantasan Buta Huruf (PBH), penetapan kalender akademik, pendirian Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), dan penghargaan terhadap para pelajar pejuang revolusi (Chairunnisa dan Zulkarnain, 2018).

Kebijakan Pemberantasan Buta Huruf ini dikeluarkan karena pada masa penjajahan Belanda masih banyak masyarakat Indonesia yang masih buta huruf. Hal ini lah yang membuat pendidikan di Indonesia masih mengalami keterbelakangan, maka dari itu Ki Sarmidi mengeluarkan kebijakan Pemberantasan Buta Huruf (PBH) dengan mengadakan kursus-kursus PBH untuk masyarakat yang masih mengalami buta huruf.

Namun, butuh waktu lama untuk mengubah buta huruf di Indonesia. Kegiatan Pemberantasan Buta Huruf ini dilakukan selama 10 tahun tapi hasil yang dicapai tidak memuaskan dapat dilihat dari hasil sensus tahun 1971 yang menunjukkan bahwa angka buta huruf di Indonesia masih mencapai 32, 21 juta masyarakat Indonesia yang masih mengalai buta huruf. Program ini masi membawa dampak baik bagi pendidikan di Indonesia meskipun tidak sepenuhnya berhasil.

Selain mengeluarkan kebijakan PBH, Ki Sarmidi Mangunsarkoro juga ingin menciptakan pelajar yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan, maka dari itu beliau mendirikan mendirikan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta yang bertujuan untuk mendidik pelajar agar menjadi warga negara yang berkebuayaan tinggi. Kebudayaan yang ditnamkan adalah kebudayaan asli Indonesia. Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) ini sejalan dengan pembanguna negara dalam sektor kebudayaan atau kultur karena pada tingkat pendidikan tinggi pengetahuan manusia dikembangkan sampai batas sistematika yang ada pada zamannya. Selain itu, pengetahuan atau ilmu yang dikembangkan di ASRI sangat beragam dan pasti akan berdampak terhadap bidang lain (Chairunnisa dan Zulkarnain, 2018).

Pelajar yang ikut berjuang dalam masa perang kemerdekaan tahun 1945-1950 juga diberikan penghargaan oleh Ki Sarmidi. Penghargaan ini diberikan untuk menghargai para pelajar yang pada saat itu harus menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan seperti pada masa Kebangkitan Nasional di mana mereka telah berperan sebagai penggerak semangat persatuan dan kebangsaan, sedangkan pada masa revolusi mereka pun tidak ketinggalan untuk ikut memanggul senjata. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut yang ikut memperjuangkan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1950 karena menurut Ki Sarmidi semangat perjuangan itu patut untuk dihargai. Tidak hanya masa revolusi, mereka juga tidak ketinggalan untuk ikut memanggul senjata (Chairunnisa dan Zulkarnain, 2018).

3. Perkembangan Pendidikan di Indonesia pada Masa Pergerakan hingga Saat Ini

Pendidikan di Indonesia pada masa pergerakan masih sangat rendah, hal ini dikarenakan pada masa itu pendidikan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu seperti para bangsawan dan orang-orang kaya sehingga masih banyak rakyat Indonesia yang mengalami buta huruf. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pendidikan di Indonesia juga masih belum maksimal. Hal ini karena pemerintah pada saat itu belum bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik sehingga berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada masa ini juga belum mampu meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kementerian PP dan K sudah didirikan sejak awal kemerdekaan Indonesia namun pembangunan pendidikan belum juga berjalan dengan maksimal. Salah satu faktor yang membuat kementerian ini belum optimal adalah seiring bergantinya kabinet berganti pula menteri PP dan K. Seringnya pergantian menteri ini lah yang menjadikan pendidikan di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Sementara itu, tujuan pendidikan pada masa awal kemerdekaan ialah untuk

mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat (Chairunnisa dan Zulkarnain, 2018).

Kurikulum *leer plan* baru dikeluarkan pada tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan asas Pancasila. Karena pada saat ini Pancasila sudah ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia dan dengan adanya dasar negara yang dijadikan sebagai rencana pembelajaran diharapkan para pelajar mampu meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian Indonesia. Setelah proklamasi Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yaitu pendidikan dapat diakses oleh semua rakyat tanpa memandang status sosial sesuai dalam UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat (1) yang berbunyi bahwa: tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Berikut merupakan sistem pendidikan pada masa orde lama (1945-1950)

1) Pendidikan Rendah

Pendidikan rendah disebut juga sebagai Sekolah Rakyat. Lama pendidikan yang ditempuh Sekolah rakyat tadinya hanya 3 tahun tapi diubah menjadi 6 tahun. Tujuan pendirian Sekolah Rakyat adalah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan juga menerima masyarakat yang memiliki keinginan tinggi untuk sekolah. Kurikulum yang diterapkan di sekolah ini lebih menekankan pada pelajaran bahasa dan berhitung.

2) Pendidikan Guru

Terdapat tiga jenis pendidikan guru yaitu (SGB, SGC, SGA). Sekolah Guru B bertujuan untuk menjadi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat, lama SGB sekitar empat tahun. Karena tenaga guru sangat dibutuhkan di Sekolah Rakyat maka didirikan Sekolah Guru C dengan lama pendidikan yang lebih singkat sehingga dapat menghasilkan guru dalam waktu yang lebih cepat. Namun SGC dinilai kurang bermanfaat alhasil sekolah ini ditutup kembali. Namun karena dirasa pendidikan guru selama empat tahun belum tejamin maka dibukalah SGA yaitu pendidikan tiga

tahun setelah SMP. Mata pelajaran yang diberikan sekolah ini kurang lebih sama dengan SGB namun lebih luas dan mendalam.

3) Pendidikan Umum

Terdapat dua jenis pendidikan umum yaitu Sekolah Menengah pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). SMP dibagi menjadi bagian A dan B. Bagian A berisi sedikit ilmu alam dan ilmu pasti. Namun, lebih banyak pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Sedangkan di bagian B lebih banyak pelajaran ilmu alam dan ilmu pasti.

SMT merupakan pendidikan 3 tahun setelah SMP yang setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

4) Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan berfokus pada pendidikan ekonomi dan kewanitaan. Pendidikan ekonomi didirikan dengan tujuan untuk kebutuhan tenaga administrasi dan pembukuan. Sekolah ini diselenggarakan oleh inspektur sekolah dagang. Sedangkan pendidikan kewanitaan didirikan oleh pemerintah setelah kemerdekaan dengan membuka Sekolah Kemandirian Putri (SKP) dan Sekolah Guru Kemandirian Putri (SGKP).

5) Pendidikan Teknik

Pendidikan teknik pada masa ini tidak tertur karena pelajarannya yang sering terlibat dalam pertahanan negara dan sering digunakan sebagai pabrik senjata.

6) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi dibuka untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut. Pendidikan tinggi ini terbuka luas bagi warga negara tanpa syarat apapun. Pelaksanaan perkuliahan ini sering dilakukan di sela-sela waktu dalam perjuangan garis depan. Lembaga pendidikan pada masa ini adalah Universitas Gajah Mada.

7) Pendidikan Tinggi Republik

Pendidikan tinggi setelah kemerdekaan berkembang pesat tapi terdapat pula tantangan karena tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang membutuhkan kekuatan dari seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan pada masa ini

dibedakan menjadi dua, yaitu Pendidikan Tingkat Tinggi Republik dan Pendidikan Tingkat Tinggi Kependudukan Belanda.

Pada orde baru sistem pendidikan Indonesia mengalami perubahan pada kurikulum, sistem pendidikan, dan penentuan kelulusan. Pada masa Orde Baru pemerintah sudah mulai mewajibkan anak-anak yang berumur 7-12 mengampu pendidikan Sekolah Dasar yang disebut juga sebagai wajib belajar 6 tahun. Berikut merupakan kurikulum pada masa Orde Baru:

Kurikulum 1968

Kurikulum ini lebih menekankan pada materi pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Disini siswa hanya menghafal teori-teori terkait mata pelajaran tersebut tanpa dapat mempraktektar teori yang diajarkan. Kurikulum ini hanya menekankan pembuatan partisipan didik hanya dari segi intelektualnya saja (Safei & Hudaidah, 2020)

2) Kurikulum 1975

Kurikulum ini sudah mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Metode pembelajaran hingga materi pembelajaran sudah dirinci ke dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional atau biasa disebut dengan satuan pelajaran. Pada kurikulum ini guru berperan penting untuk membuat rincian pelajaran untuk mencapai tujuan belajar dalam proses belajar mengajar. Dengan dibuatnya kurikulum ini kegiatan belajar mengajar lebih sistematis.

3) Kurikulum 1984

Pada kurikulum ini guru hanya menjadi fasilitator untuk mengawasi siswa belajar. Siswa dituntut untuk mengamati suatu hal, mengelompokkan, mendiskusikan, aktif bertanya. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, memberi komentar dan pendapat terhadap materi pelajaran. Pada kurikulum ini siswa menjadi subjek utama dalam kegiatan belajar mengajar.

4) Kurikulum 1994

Kurikulum ini adalah hasil dari penggabungan antara kurikulum 1975 dan 1984, dimana pada kurikulum ini siswa

wajib menuntaskan beban belajar yang mereka ampu tanpa bisa menolak terhadap banyaknya beban belajar yang diberikan. Kurikulum ini menjadi kurikulum yang sangat padat.

Pada masa reformasi sistem pendidikan diubah menjadi sector pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model "Manajemen Berbasis Sekolah". Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem "Kurikulum Berbasis Kompetensi" (Hartono, Y., 20?). berikut merupakan kurikulum era reformasi hingga sekarang:

1) Kurikulum 2004

Materi yang diterapkan pada kurikulum 2004 tidak jauh berbeda dengan kurikulum 1994. Perbedaan yang terjadi hanya pada cara belajar peserta didik di kelas. Pada kurikulum ini, siswa diharapkan ikut aktif dalam mengembangkan keterampilan iptek dan bekerja sama serta menubuhkan solidaritas meski saling berkompetensi.

2) KTSP 2006

Pada kurikulum ini, pemerintah pusat mulai menetapkan standar kompetensi dan guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus. Penilaiannya pun harus sesuai pada kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing.

3) Kurikulum 2013

Kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Namun, kurikulum ini kurang efektif karena guru tidak siap untuk menjalankan kurikulum ini. Kurikulum ini dinilai gagal dan diganti oleh Kurikulum Nasional.

4) Kurikulum Merdeka

Kurikulum ini digunakan untuk memberi kebebasan pada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Pada kurikulum ini peserta didik juga memiliki waktu untuk mendalami konsep pelajaran serta guru juga lebih bebas untuk memilih metode

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

KESIMPULAN

Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan pada saat ini pendidikan diklasifikasikan oleh status sosial yang hanya bisa diakses oleh kalangan bangsawan dan kelas atas saja. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat buta huruf di Indonesia. Pendidikan di Indonesia akan terus memburuk jika tidak ada pergerakan dari kaum-kaum terpelajar. Salah satu tokoh pergerakan yang berpengaruh dalam bidang pendidikan adalah Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Beliau merupakan tokoh penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan latarbelakangnya di bidang pendidikan, beliau mampu merubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dibuktikan dengan pembuatan cabang Taman Siswa di Jakarta dan membuat rencana pelajaran baru yaitu kurikulum Taman Siswa yang kemudian di sahkan dengan nama "Daftar Pelajaran Mangunsarkoro" pada tahun 1932.

Ki Sarmidi mangunsarkoro juga merupakan salah satu menteri menteri yang membuat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional ini menjadikan dasar sistem pendidikan di Indonesia yang masih berlaku hingga sekarang, meskipun telah mengalami beberapa kali revisi. Dalam hal ini, Ki Sarmidi memiliki pengaruh penting dalam sitem pendidikan Indonesia. Adapun perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia mengalami kemajuan dari yang tadinya sistem pembelajaran hanya berpusat pada guru dan siswa hanya menjadi objek pembelajaran. Namun, seiring berjalannya waktu siswa sudah menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Siswa juga boleh menanggapi, mengomentari, dan aktif bertanya. Guru juga diberi kebebasan dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairunisa, C. (2018). Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pada Masa Menteri Sarmidi Mangunsarkoro (1949-1950). *Risalah*, 5(6).
- Dadang. (2005, March 15). *Pendidikan, Bukan Jaminan Kerja! (Catatan Arah Dan Motif Pendidikan Nasional)*. <https://www.its.ac.id/news/2005/03/15/pendidikan-bukan-jaminan-kerja-catatan-arrah-dan-motif-pendidikan-nasional/>
- Dwi, P., & Yahya, R. 1957. Peranan Ki Sarmidi Mangunsarkoro Dalam Bidang Pendidikan Tahun 1926-1957. May 1904.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 9(2), 157-171.
- Hartono, R. (2018, Februari 28). *Ingat Sekolah Rakyat, Ingat Tan Malaka*. <https://www.berdikarionline.com/tan-malaka-dan-sekolah-rakyat/>
- Karyanti, T. (2010). Sumpah Pemuda dan Nasionalisme Indonesia. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 1(3).
- Khasanah, D. M. N. (2022, Maret 22). *Politik Etis: Mencetak Golongan Terpelajar dan Diskriminasi Pendidikan*. <https://kumparan.com/diana-may-nur-khasanah/politik-etis-mencetak-golongan-terpelajar-dan-diskriminasi-pendidikan-1xjexXX4XZ/full>
- Kominfo. (2016, 2 Mei). *Mencoba Memahami Semboyan Ki Hajar Dewantara*. <https://klatenkab.go.id/mencoba-memahami-semboyan-ki-hajar-dewantara/>
- Menteri Sarmidi Mangunsarkoro (1949-1950). *Risalah*, 5(6).
- Naviah, N. I. (2022). Peran Pemuda Dalam Pergerakan Indonesia Di Tahun 1928-1940. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 2(2), 317-330.
- Prabowo, G. (2016). Undang-Undang Pokok Pendidikan Dan Pengajaran (Uupp) No. 4 Tahun 1950 Bagi Pendidikan Di Indonesia 1945-1954. *Risalah*, 1(4).
- Rahmanto, D. (2016). Peranan Ki Sarmidi Mangunsarkoro Dalam Bidang Pendidikan Tahun 1926-1957. *Risalah*, 1(1).
- Ramadhani, A. R. (2018). Prinses Juliana School Di Yogyakarta Tahun 1919-1950. *Risalah*, 5(6).
- Safei, H., & Hudaidah, H. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1).
- Sarmidi, M. S. P. N. K. Mangunsarkoro bagi Peserta Didik MI/SD di Indonesia.
- Tarigan, P. B. 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.
- Widada, Rh. 2013. *Guru Patriot: Ki Sarmidi Mangunsarkoro*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.